

PENGARUH VARIABEL RUANG FISKAL, DAU DAN DBH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PEMERINTAH PROVINSI

*The Impact of Fiscal Space, General Allocation Fund (DAU) and Revenue
Sharing Fund (DBH) to Human Development Index (HDI/IPM)
in Provincial Level*

Slamet Widodo*

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: * slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

The purpose of this research is to analyze the impact of fiscal space, General Allocation Fund (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH) to Human Development Index (HDI/IPM) in provincial level. The reseach used data of IPM, fiscal space, DAU, and DBH for the period of 2006-2015 from Central Agency of Statictic (BPS), Ministry of Finance, and other related institutions. Reseach methology used Regression of Data Panel with Fixed Effect Model and Ordinary Least Square estimation. The results of the reseach show that the fiscal space, DAU and DBH variables significantly influence the HDI of provincial government with negative direction.

Keywords: *Fiscal Decentralization, HDI, OLS FEM.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah sebagai dampak dari penerapan desentralisasi fiskal di tahun 2001, tidak hanya terfokus pada pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga bagi pemerintah provinsi. Akibat adanya pelimpahan kewenangan ini, Pemerintah Pusat setiap tahunnya mengalokasikan dana transfer ke daerah (dana perimbangan) kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Alokasinya terus mengalami peningkatan. Dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah provinsi dalam kurun waktu 2006-2015 mengalami kenaikan sebesar 55 persen dari sebesar Rp33,6 triliun menjadi sebesar Rp61,6 triliun.

Seiring dengan peningkatan alokasi tersebut, rasio kemandirian²⁵ pemerintah provinsi juga semakin membaik. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah meningkat sebesar 44 persen di tahun 2006 menjadi sebesar 53 persen di tahun 2015. Sementara rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan dari sebesar 49 persen di tahun 2005 menjadi sebesar 25 persen di tahun 2015.

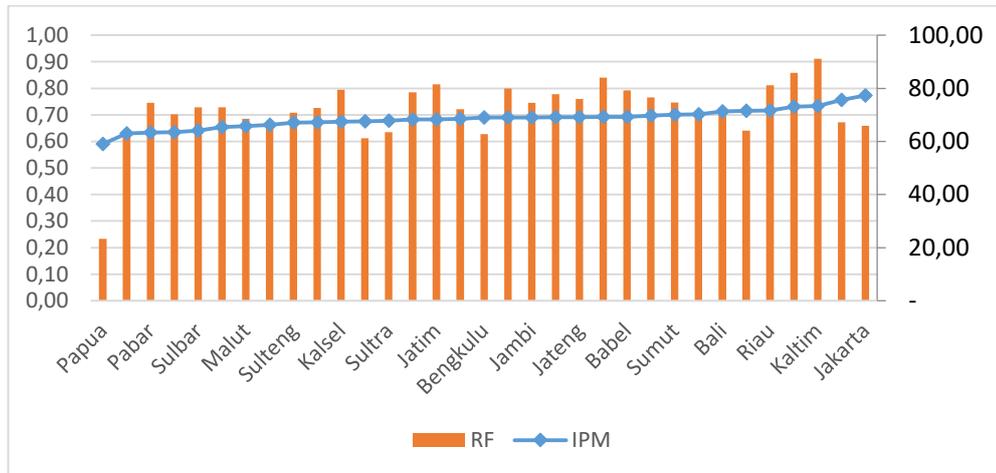
Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami peningkatan sebesar 58 persen dalam kurun waktu 2006-2015. Sumbangannya terhadap total pendapatan daerah mencapai 25,05 persen dalam kurun waktu yang sama. Tidak seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), DAU dan DBH memiliki sifat *block grant*, dalam arti kewenangan pengalokasiannya untuk membiayai belanja daerah sepenuhnya diserahkan kepada daerah.

Kedua kondisi ini, yaitu dengan membaiknya kemandirian daerah dan meningkatkan dana perimbangan (khususnya DAU dan DBH) berdampak pada semakin besarnya keleluasaan daerah, yang tercermin dengan semakin besarnya ruang fiskal yang tersedia bagi daerah, dalam menentukan alokasi pendanaannya kepada sektor-sektor prioritas yang mampu meningkatkan IPM seperti sektor kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

1.2 Permasalahan

DAU dan DBH merupakan bagian dari komponen transfer ke daerah dan menjadi sumber bagi peningkatan ruang fiskal daerah. Ruang fiskal mencerminkan seberapa besar keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menentukan program/kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin besar keleluasaan daerah dalam membiayai belanja daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Perkembangan rata-rata ruang fiskal pemerintah provinsi dalam kurun waktu 2006-2015 terlihat dari gambar 1. Dalam kurun waktu 2006-2015, ruang fiskal pemerintah provinsi secara rata-rata berada di atas lebih 60 persen, kecuali Provinsi Papua.

²⁵ Rasio kemandirian daerah diukur menggunakan dua indikator yaitu rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, dan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar kemandirian daerah, dan semakin besar rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah, semakin kecil kemandirian daerah. Daerah dengan tingkat kemandirian yang baik adalah daerah dengan rasio PAD yang besar dan rasio dana perimbangan yang kecil.

Gambar 1. *Rerata Ruang Fiskal dan IPM Provinsi, 2006-2015*

Sumber : BPS, (data diolah)

Peningkatan ruang fiskal ini ternyata tidak diiringi dengan komitmen daerah untuk memberi prioritas lebih besar pada sektor-sektor yang memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi indikator dalam pembentukan IPM. Data BPS menunjukkan bahwa IPM sepanjang periode observasi tidak menunjukkan perubahan signifikan. Secara rata-rata, IPM Indonesia pada tahun 2006 sebesar 70,1 dan menurun menjadi sebesar 69,55 di tahun 2015. Rerata sepanjang tahun 2006-2015 adalah sebesar 68,49 dengan standar deviasi sebesar 4,26.

Besarnya ruang fiskal daerah dan meningkatnya alokasi DAU dan DBH belum berdampak signifikan pada perbaikan IPM. Upaya meningkatkan IPM sebagai prioritas nasional harus diiringi dengan kebijakan serupa di daerah, mengingat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pemerintah daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan setiap tahunnya oleh pemerintah dan DPR.

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu

- a. Melihat pengaruh variabel ruang fiskal, DAU dan DBH terhadap indeks pembangunan manusia
- b. Memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya terkait dengan IPM.

2. Tinjauan Pustaka

Kenaikan alokasi dana transfer ke daerah setiap tahunnya merupakan konsekuensi adanya peralihan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan fiskal ditempuh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui APBN, pemerintah menjalankan fungsi alokasi agar sumberdaya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efisien, dan fungsi distribusi terkait dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi masyarakat. Peran kebijakan fiskal menjadi penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan prioritas kegiatan/program di sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan lain-lain. Untuk menjamin terpenuhinya prioritas pembangunan tersebut, diperlukan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah untuk membiayai kegiatan prioritasnya.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah.²⁶ Pilihan untuk alokasi anggaran pada bidang-bidang prioritas tentunya tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah secara umum. Karenanya, Peter S. Heller (2005) juga mendefinisikan ruang fiskal sebagai ketersediaan ruang yang memungkinkan pemerintah menyediakan sumberdaya untuk tujuan yang diinginkan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah²⁷.

Semakin besar ruang fiskal tentu semakin memudahkan daerah dalam menetapkan sendiri prioritas belanjanya. Apabila daerah ingin meningkatkan IPM, maka daerah perlu memberi prioritas dan anggaran lebih besar untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Karena dari sektor inilah terbentuk nilai indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran yang akan menghasilkan nilai IPM suatu daerah. Penempatan prioritas dan alokasi pada sektor pendidikan akan memperbaiki nilai indeks pendidikan yang terbentuk dari

²⁶ Kementerian Keuangan RI, Deskripsi dan Analisis APBD 2014

²⁷ Peter S. Heller, Understanding Fiscal Space, IMF, 2005

angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Prioritas sektor kesehatan akan meningkatkan indeks kesehatan yang tergambar dari angka harapan hidup, atau meningkatnya standar hidup layak yang akan meningkatkan indeks pengeluaran.

Karakteristik DAU dan DBH yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tentu semakin menjamin bahwa kekeluargaan pemerintah daerah memang digunakan sepenuhnya untuk memprioritaskan kebutuhan daerah khususnya dalam meningkatkan IPM daerah. Melalui pengeluaran pemerintah (belanja daerah), sasaran kebijakan tidak hanya pada meningkatkan pendapatan regional saja tetapi juga memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena dampak dari kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan regional atau memperluas kesempatan kerja tidaklah cukup, tapi juga harus memperhitungkan siapa atau masyarakat lapisan mana yang akan meningkatkan pendapatannya atau kesejahteraannya (Dumairy, 1996)

2.1 Hubungan antar variabel

a. Hubungan antara ruang fiskal dengan IPM.

Besar kecilnya ruang fiskal menunjukkan tinggi rendahnya kekeluargaan daerah dalam menentukan prioritas alokasi belanja daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin besar kekeluargaan daerah untuk membiayai belanjanya. Kesejahteraan masyarakat tentu menjadi tujuan akhir dari kebijakan Pemerintah Daerah. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya IPM daerah. Peningkatan IPM daerah dapat dicapai apabila pemerintah daerah memberi prioritas dan anggaran yang lebih besar bagi sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan IPM.

b. Hubungan antara DAU dan DBH dengan IPM.

Karakteristik DAU dan DBH yang bersifat *block grant* juga mencerminkan tingginya kekeluargaan daerah dalam memberi prioritas dan anggaran yang lebih besar bagi sektor pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan IPM.

2.2 Penelitian terdahulu

- a. Study Siswandi (2015) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB, PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM melalui belanja modal menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah, namun sesuai dengan formulasinya, DAU akan lebih diprioritaskan kepada pemenuhan komponen alokasi dasar. Alokasi dasar ini didominasi penggunaannya untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS.
- b. Study Rivai (2017) mengenai pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap IPM pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara membuktikan bahwa DAU secara parsial tidak berpengaruh terhadap IPM, karena pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM relatif sangat sedikit.
- c. Study Setyowati dan Suparwati (2012) mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap IPM dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa DAK, DAU dan PAD terbukti berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal, sementara pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berpengaruh positif terhadap IPM.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis penelitian dan Sumber Data

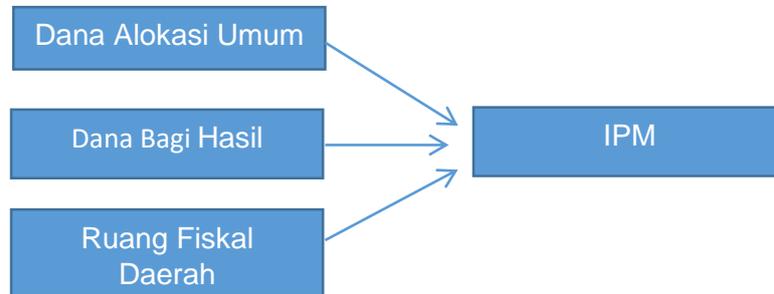
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2006-2015, dan data *cross section* yang terdiri atas 33 Provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

3.2 Model Penelitian

Besarnya ruang fiskal dan karakteristik DAU dan DBH yang bersifat *block grant*, memberi keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah, termasuk sektor pendidikan,

kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang menjadi indikator utama pembentuk IPM.

Gambar 2. Skema hubungan variabel



Skema hubungan antara variabel IPM daerah dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut :

$$IPM = a + \beta_1 RF_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \varepsilon_i$$

Keterangan :

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- RF = Ruang fiskal daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DBH = Dana Alokasi Khusus
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisiensi
- i = cross section
- t = time series
- ε_i = error term

3.3 Teknik Analisis Data Panel

Teknik analisis ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model data panel. Data panel (*pooled data*) adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu (rumah tangga, perusahaan, kabupaten/kota, dll) pada periode waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel merupakan gabungan antara data lintas-waktu (*time-series*) dan data lintas-individu (*cross-section*).²⁸

Teknis analisis menggunakan regresi data panel, dengan tiga pendekatan yaitu :

²⁸ Ekananda, Mahyus, : Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2.

a. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

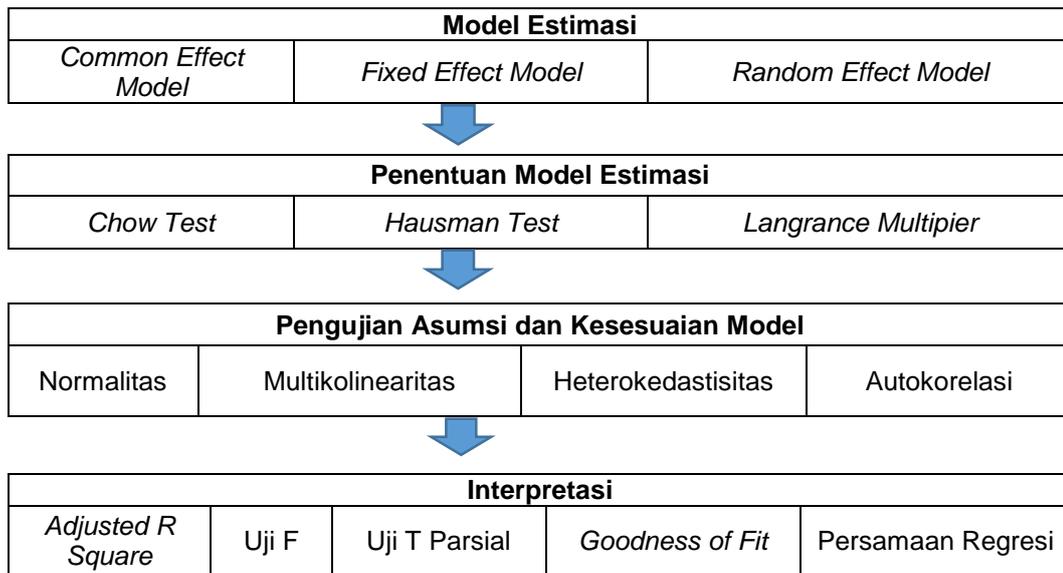
b. Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

c. Random Effect Model (REM)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS). Tahapan regresi data panel dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3. Tahapan Analisis Data Panel



Sumber : Penjelasan Metode Regresi Data Panel ²⁹

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu :

4.1 Pemilihan model terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu uji *Chow-test*, uji *Hausman Test* dan uji Lagrange Multiplier Test.

a. Pemilihan Model CEM dan FEM

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji *Chow-test* untuk menentukan apakah *common effect model (CEM/PLS)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi Square* > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM.

H_1 = Jika *Chi Square* < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.

²⁹ Hidayat. "Penjelasan Metode Analisis Regresi Data Panel" dalam <https://www.statistikian.com/2014/11/regresi-data-panel.html> diakses tanggal 1 Mei 2018

Tabel 1. Hasil Uji Chow-test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: EQ101

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.212102	(32,294)	0.0000
Cross-section Chi-square	394.873260	32	0.0000

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil pengujian menunjukkan baik F test maupun *Chi-square* signifikan (p -value 0,000 lebih kecil dari 5%) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti **Fixed Effect**.

b. Pemilihan Model REM dan FEM.

Proses pemilihan model dilakukan melalui uji Hausman-test untuk menentukan apakah *Random effect model (REM)* yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model (FEM)*.

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi Square* > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat.

H_1 = Jika *Chi Square* < 0,05, maka Tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: EQ101

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	65.363894	3	0.0000

Sumber: Data diolah, 2018

Hasil pengujian menunjukkan signifikan (p -value 0,0000 kurang dari 0,05%), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian model mengikuti **Fixed Effect**.

c. Uji LM test : adanya *heterosedastisity* antar kelompok individu

Uji *Lagrange Multiplier Test* harus dilakukan jika pada proses pemilihan model melalui uji *Chow-test* dan uji *Hausman test* menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu:

- Uji *Chow Test* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *Common Effect* dari pada *Fixed Effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *Common Effect* lebih baik dari pada *Random Effect*, maka diperlukan uji *Lagrange Multiplier Test*.
- Uji *Hausman Test* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *Random effect* dari pada *Fixed Effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *Random Effect* lebih baik dari pada *Common Effect*, maka diperlukan uji *Lagrange Multiplier Test*.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam model regresi mencakup uji linieritas, autokorelasi, heterokedastisitas, multikolinieritas, dan normalitas. Dalam kasus data panel, beberapa referensi menyebutkan bahwa tidak seluruh uji asumsi klasik ini dilakukan. Beberapa pendapat terkait perlu tidaknya dilakukan uji asumsi klasik, dapat dirangkum sebagai berikut:

- Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien (Hariyanto, 2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*. Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati 1992 dalam Wahyuddin et al). Dengan keunggulan regresi data panel maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia; 2004, dalam Shochrul R, Ajija, dkk. 2011).³⁰

³⁰ <http://digilib.unila.ac.id/1213/4/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 1 Mei 2018

- Model *fixed effect* dengan teknik estimasi *Ordinary Least Squared (OLS)* seperti yang digunakan dalam penelitian ini, tidak harus melalui semua uji asumsi klasik. Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Dengan demikian, uji asumsi klasik yang diperlukan dalam regresi data panel, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja.³¹

Berbekal pada pendapat yang terakhir, maka uji asumsi klasik yang dilakukan hanya uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Tabel 3. Hasil uji Multikolinieritas

	LOG(RF)	LOG(DAU+10)	LOG(DBH+10)
LOG(RF)	1	-0.2725697921180898	0.1529158817428496
LOG(DAU+10)	-0.2725697921180898	1	-0.3230439870911664
LOG(DBH+10)	0.1529158817428496	-0.3230439870911664	1

Sumber: Data diolah, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel independen DAU dan DBH dibawah 0,80 → tidak ada multikolinieritas.

³¹ Iqbal. "Regresi Data Panel (2) dalam <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/> diakses tanggal 1 Mei 201. Perbanas Institute.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Uji glejser meregresikan variabel-variabel bebas terhadap residual abasolut. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sementara absolut adalah nilai mutlakny. Uji glejser ini hanya berlaku pada *fixed effect*. Jadi, ketika hasil analisis dan pemilihan model regresi yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM), maka uji glejser perlu digunakan. Hal itu untuk melihat apakah terjadi pelanggaran asumsi klasik heteroskedastis pada model regresi atau tidak.³²

Tabel 4. Hasil Uji Glejser atas Variabel Resabs

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/05/18 *Time:* 21:54

Sample: 2006 2015

Periods included: 10

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 330

White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
LOG(RF)	1.553527	0.526986	2.947945	0.0035
LOG(DAU+10)	-0.506207	0.120363	-4.205676	0.0000
LOG(DBH+10)	-0.110088	0.194421	-0.566235	0.5717
C	6.023628	1.157385	5.204517	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Sumber: Data diolah, 2018

Indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, adalah apabila **nilai prob. < 0,05** maka **adanya heteroskedastisitas**. Sebaliknya apabila **nilai probabilitas** pada setiap variabel independen **> 0,05** maka **terbebas dari planggaran asumsi heteroskedastis**.

³² Faizal. "Tutorial: Cara mudah Uji Asumsi Klasik Pada Data Panel" dalam <http://www.sharingid.com/uji-asumsi-klasik-pada-data-panel/> diakses tanggal 1 Mei 2018

Hasil uji glejser dengan menggunakan variabel *resabs* sebagai variabel dependent menunjukkan adanya pelanggaran heteroskedastisitas yaitu pada variabel RF dan DAU karena nilai prob < **0,05**. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan regresi kembali dengan pembobotan *white/robust standard error regression*. Hasil dari regresi dengan pembobotan *white* inilah yang akan digunakan sebagai model terpilih.

Table 5. Hasil Regresi dengan Pembobotan *white/robust standar error regression*

Dependent Variable: IPM
Method: Panel Least Squares
Date: 05/05/18 Time: 22:11
Sample: 2006 2015
Periods included: 10
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 330
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
LOG(RF)	-2.915053	1.145905	-2.543888	0.0115
LOG(DAU+10)	-0.696780	0.232314	-2.999299	0.0029
LOG(DBH+10)	-3.234748	0.397407	-8.139644	0.0000
C	90.11711	2.070564	43.52297	0.0000

Effects Specification

<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>			
<i>R-squared</i>	0.790647	<i>Mean dependent var</i>	68.49573
<i>Adjusted R-squared</i>	0.765724	<i>S.D. dependent var</i>	4.265658
<i>S.E. of regression</i>	2.064665	<i>Akaike info criterion</i>	4.390482
<i>Sum squared resid</i>	1253.276	<i>Schwarz criterion</i>	4.804929
<i>Log likelihood</i>	-688.4296	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	4.555799
<i>F-statistic</i>	31.72366	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.293165
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2018

4.3 Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka akan dilakukan uji *Goodness of Fit*. Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F statistik, uji t statistik dan uji koefisien determinasi (R²).

a. Uji *F-statistic*

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji *F-stat*

Nilai	F-Statistik	P-value	Kesimpulan
	31.72366	0.000000	Signifikan
Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$			

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value}$ $0,0000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji *t-statistic*

Uji *t-statistic* dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis dalam pengujian *t-statistic* adalah :

H_0 : secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_1 : secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Jika probabilitas nilai $t_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , sebaliknya jika probabilitas nilai $t_{hitung} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5%.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Keterangan
LOG(RF)	-2.915053	1.145905	-2.543888	0.0115	signifikan
LOG(DAU+10)	-0.696780	0.232314	-2.999299	0.0029	Signifikan
LOG(DBH+10)	-3.234748	0.397407	-8.139644	0.0000	Signifikan
C	90.11711	2.070564	43.52297	0.0000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen telah signifikan berpengaruh terhadap variabel IPM. Dengan nilai *p-value* berturut-turut sebesar 0.0115, 0.0029, 0,0000 , 0,0000 yang lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$.

c. Uji Koefisien Determinasi R² dengan Variabel yang Signifikan

Uji koefisien daterminasi R² dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 8. Uji R² dengan Variabel yang Signifikan

Koefisiensi determinasi	
<i>R-squared</i>	0.790647
<i>Adjusted R-squared</i>	0.765724

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 76,5 persen dari IPM pemerintah provinsi dapat dijelaskan oleh variabel RF, DAU dan DBH, sedangkan sisanya sebesar 33,05 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

d. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel diatas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut

$$\text{IPM} = -2.91505282477 \cdot \text{LOG}(\text{RF}) - 0.696780297845 \cdot \text{LOG}(\text{DAU}+10) - 3.23474822954 \cdot \text{LOG}(\text{DBH}+10) + 90.1171067937 + [\text{CX}=\text{F}]$$

Berdasarkan pada tabel 5, hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengaruh Ruang fiskal terhadap IPM

Perubahan 1 persen dalam RF akan mengurangi -2,915 persen IPM. Dengan melihat pada data ini, ada pengaruh yang signifikan namun negatif antara RF dengan IPM.

Indikator IPM adalah harapan lama sekolah (HLL), rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita, yang terangkum dalam indeks pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran. Disamping transfer ke daerah yang masuk dalam APBD, ada transfer dari kementerian/lembaga dalam bentuk non-dana perimbangan yang ditujukan untuk pembangunan

sektor kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Karena tidak dikelola langsung oleh daerah, maka dana ini bukan menjadi komponen yang akan mempengaruhi ruang fiskal daerah. Bahkan, kondisi ruang fiskal yang relatif tinggi dalam periode 2006-2015 justru tidak linear dengan indeks kapasitas fiskal daerah. Data menunjukkan daerah dengan ruang fiskal yang tinggi tetap memiliki indeks kapasitas fiskal yang rendah. Meningkatnya dana *idle* pemda di perbankan bisa menjadi salah satu penyebab tidak adanya kaitan ruang fiskal dengan IPM. Data per September 2014 menunjukkan rata-rata besaran dana per provinsi di perbankan sebesar Rp2,2 triliun, sementara rata-rata besaran dana pemerintah kabupaten/kota di perbankan sebesar Rp347,2 miliar.³³

- Pengaruh DAU dan DBH terhadap IPM

Setiap perubahan 1 persen DAU akan menurunkan 0,69 persen IPM dan setiap perubahan 1 persen DBH akan menurunkan 3,23 persen IPM. Variabel DAU dan DBH sama memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM daerah, meskipun hubungannya negatif, yang berarti bahwa perubahan DAU atau DBH tidak secara langsung meningkatkan IPM. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siswandi (2015) bahwa variabel DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai komponen terbesar dana perimbangan dan peruntukannya diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, DAU dan DBH umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib yang harus disediakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.

Belanja daerah diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau

³³ Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle, Triwulan III Tahun 2014, Kementerian Keuangan

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga³⁴. Dalam periode 2006-2015, proporsi rerata belanja mengikat (belanja pegawai dan belanja barang/jasa) mencapai 44,61 persen terhadap rerata total belanja daerah.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Model yang layak digunakan untuk menganalisis pengaruh RF, DAU dan DBH terhadap IPM pemerintah provinsi adalah *Fixed Effect Model*.
- b. Dari ketiga variabel independen yang diteliti, seluruhnya berpengaruh signifikan terhadap IPM pemerintah provinsi dengan arah negatif.
- c. Dari dua variabel yang berpengaruh signifikan, variabel DBH merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap IPM.

5.2 Rekomendasi

- a. Kebijakan pengendalian transfer ke daerah untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH yang diterapkan mulai tahun anggaran 2018³⁵ merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk memastikan komitmen daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya, karena kedua variabel ini tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan *affirmative* bagi pemerintah daerah untuk menjadikan peningkatan IPM sebagai target utama yang harus dicapai oleh daerah.
- b. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi pedoman teknis bagi pelaksanaan program pemerintah pusat (K/L) di daerah perlu dievaluasi secara reguler untuk memperkirakan kelaikannya. Dalam beberapa kasus penerapan SPM terbentur dengan kondisi-kondisi tertentu daerah, sebagai contoh terbatasnya lahan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi terkait dengan pembangunan fisik pendidikan memaksa daerah untuk menggunakan sumber dana APBD, yang seharusnya dapat digunakan untuk prioritas lain. Dengan

³⁴ Permendagri nomor 33 tahun 2017

³⁵ Pasal 15 ayat (3) UU No. 15/2017 tentang APBN TA 2018

pelaksanaan review SPM yang menyesuaikan dengan kondisi lokal, upaya peningkatan IPM dapat dilakukan secara lebih efektif.

- c. Kenaikan DAU dan DBH justru tidak berpengaruh terhadap IPM (bahkan berpengaruh negatif) semakin memperkuat fakta bahwa sebagian besar DAU dan DBH dialokasikan untuk belanja non produktif yaitu belanja pegawai dan belanja rutin. Terkait dengan hal ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan review terhadap data dasar yang digunakan dalam mengalokasikan DAU, dengan tidak lagi memasukkan beban belanja pegawai dalam kebutuhan fiskal daerah untuk menghilangkan persepsi daerah bahwa DAU diperuntukkan sepenuhnya untuk belanja pegawai.

Daftar Pustaka

Allen Schick. 2008. *Budgeting For Fiscal Space, Asian OECD Senior Budget Officials Meeting*, January 2008.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi, berbagai tahun*, Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Badan Pusat Statistik. *Booklet IPM Metode Baru*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Ekananda, Makyus (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Heller, Peter S. 2005. *Understanding Fiscal Space*. IMF

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II*. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Postur APBN Indonesia*. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta

Kementerian Keuangan RI. 2014. *Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle, Triwulan III Tahun 2014*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Kementerian Keuangan RI. *Leaflet Dana Alokasi Umum*. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Kementerian Keuangan RI. *Leaflet Dana Bagi Hasil*. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Kementerian Keuangan RI.2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Kementerian Keuangan. 2014. *Pelengkap Buku Pegangan 2014, Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan RI. *Peta Kapasitas Fiskal, berbagai tahun*. Kementerian Keuangan RI.

Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang APBN Tahun Anggaran 2018